

## **BAB III**

### **KONDISI EKONOMI, POLITIK, DAN KEAMANAN ASEAN**

Sebagai organisasi regional yang telah berkiprah lebih dari 50 tahun, eksistensi ASEAN tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Sejak awal ASEAN didirikan hingga saat ini, organisasi regional ini telah berkembang menjadi organisasi regional yang memiliki banyak prestasi dan pencapaian. Sebagai organisasi yang mewadahi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, keberadaan ASEAN sudah pasti mendatangkan keuntungan bagi negara-negara anggotanya. Di samping itu, ASEAN juga menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya untuk menjalankan kepentingan nasional Negara mereka. Dengan adanya fakta tersebut, tak heran Timor Leste sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ingin bergabung menjadi anggota ASEAN. Pada bab III ini akan dibahas sejarah singkat ASEAN, masyarakat ASEAN, kondisi ekonomi, politik, dan keamanan ASEAN, keuntungan menjadi anggota ASEAN, mekanisme penerimaan anggota ASEAN, serta langkah-langkah yang telah ditempuh Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota ASEAN.

#### **A. Sejarah ASEAN**

Pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan pertemuan di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut kelima perwakilan negara-negara menandatangani sebuah dokumen penting. Berdasarkan dokumen tersebutlah Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau yang kemudian dikenal dengan ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) lahir. Lima Menteri Luar Negeri yang

menandatangerannya adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Sejalan dengan perkembangan ASEAN, lima negara di luar negara pendiri berkeinginan menggabungkan diri dalam organisasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Jakarta, Indonesia.
2. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 29-30 Juli 1995
3. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997.
4. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi.

Terkait dengan keanggotaan ASEAN, Timor Leste yang berdasarkan letak geografis berada di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan dirinya sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Hingga akhir tahun 2017 perihal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan kesepuluh negara anggota ASEAN (Kemlu, Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN, 2015).

## **B. Masyarakat ASEAN**

Masyarakat ASEAN merupakan kesatuan bangsa Asia Tenggara yang memiliki pandangan maju, hidup dengan damai, stabil dan makmur, serta terikat bersama dalam kemitraaan pembangunan yang dinamis dan saling peduli. Alasan dibentuknya Masyarakat ASEAN salah satunya ialah karena adanya pengaruh negatif krisis ekonomi yang menimpa negara-

negara anggota ASEAN pada tahun 1997. Hal ini kemudian mendorong ASEAN untuk menjadikan kawasannya sebagai kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi (Setnas-ASEAN, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, pada *ASEAN Summit* yang ke-9 tahun 2003 di Bali, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat ASEAN. Sejalan dengan kesepakatan tersebut, ASEAN telah menyusun cetak biru dari ketiga pilar masyarakat ASEAN, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Politik-Keamanan, Pilar Sosial Budaya (Setnas-ASEAN, 2017). Pilar-pilar ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah blok karena masyarakat regional terhubung, berbagi minat, dan berkembang di jalur baru. Tujuan keseluruhan Komunitas ASEAN adalah untuk membangun Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadi organisasi kerjasama antar pemerintah yang luas dan lebih mengikat atas dasar hukum Piagam ASEAN (VNA, 2015).

## **1. Pilar ekonomi**

Pilar ini merupakan pilar terpenting dikarenakan pilar ekonomi dianggap sebagai prasyarat untuk realisasi dua pilar lainnya. Pilar ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil, sehingga meningkatkan daya saing regional, kemakmuran, dan daya tarik bagi investor asing (VNA, 2015).

Negara-negara ASEAN mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas blok dengan mitra-mitra utamanya (Cina, Jepang, Republik Korea, India, Australia dan Selandia Baru) dan bekerja keras untuk menyelesaikan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional sehingga dapat menciptakan ruang ekonomi terbuka di Asia Timur. Upaya ini dimaksudkan untuk memperluas integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global (VNA, 2015).

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa MEA pada tahun 2015 nantinya menjadi babak baru bagi

perkembangan perekonomian negara-negara khususnya di kawasan Asia Tenggara sekaligus memberikan harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih besar lagi. Hal ini tentunya membutuhkan persiapan serta pertimbangan strategis atas berbagai fakta kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi di beberapa negara anggota ASEAN yang sangat beragam, misalnya Kamboja, Laos dan Myanmar. Perlunya strategi khusus bagi negara-negara tersebut untuk terus memacu keaktifan perekonomian domestiknya agar maju sejajar, minimal mereka dapat menyeimbangkan posisi kesiapan ekonominya dalam proses integrasi ekonomi 2015 nanti. Hal ini dirasa perlu mengingat kondisi ekonomi negara tersebut relatif tidak setangguh negara anggota lain yang terlihat mapan secara ekonomi seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia dan Brunei Darussalam, Memang melihat perbedaan sektor ekonomi tentunya membutuhkan koordinasi efektif dalam memacu perekonomian anggota negara lainnya, agar mampu menapaki rencana implementasi Masyarakat ASEAN 2015 dengan seimbang dan efektif (Yustikaningrum, 2013).

## **2. Pilar politik-keamanan ASEAN**

Berkenaan dengan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC), komunitas ini membayangkan memastikan perdamaian dan keamanan untuk pembangunan di Asia Tenggara melalui peningkatan kerja sama keamanan-politik blok dan kontribusi oleh para mitranya. Khususnya, APSC tidak dimaksudkan untuk membuat blok pertahanan bersama. Cetak Biru APSC mengatur kerja sama masyarakat dalam pengembangan politik, membentuk dan berbagi norma, pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian paska-konflik, dan mekanisme implementasi. Dengan ini ASEAN diharapkan dapat menjadi komunitas berbasis nilai dan norma bersama yang berdasarkan aturan; wilayah yang kohesif, damai, stabil, dan tangguh dengan

tanggung jawab bersama untuk keamanan komprehensif; serta wilayah yang dinamis dan berwawasan ke luar di dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung (VNA, 2015).

Untuk mempromosikan komunitas berbasis nilai dan norma bersama, negara-negara tersebut memperkuat kolaborasi politik. Mereka juga membentuk dan berbagi norma sebagaimana diilustrasikan dalam Perjanjian Amity dan Kerjasama, Perjanjian tentang Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, dan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Timur.

Untuk membentuk wilayah yang kohesif, damai, stabil dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan komprehensif, negara-negara anggota ASEAN telah bergandengan tangan untuk membangun kepercayaan, membina dialog dan saling pengertian demi mencegah konflik, meningkatkan hubungan pertahanan dan keamanan, dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Mereka juga telah bekerja sama untuk membangun perdamaian pascakonflik di bidang keamanan non-tradisional (VNA, 2015).

ASEAN juga telah meningkatkan sentralitasnya dalam kerja sama regional dan pembangunan komunitas, memperluas hubungan dengan para mitra dan berusaha untuk memainkan perannya sebagai momentum utama dalam arsitektur regional yang terbuka dan transparan yang pada akhirnya mengubahnya menjadi kawasan yang dinamis dalam integrasi yang semakin terintegrasi. Kerja sama menuju APSC ini telah diintensifkan seperti dalam pertahanan melalui Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan ADMM Plus, dan dalam keamanan laut melalui Forum Maritim ASEAN dan Forum Maritim ASEAN yang diperluas (VNA, 2015).

### **3. Pilar sosial-budaya**

Sementara itu, Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) bertujuan untuk berkontribusi dalam mewujudkan

Komunitas ASEAN yang berpusat pada masyarakat dan bertanggung jawab secara sosial dengan tujuan untuk mencapai solidaritas dan persatuan yang langgeng di antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. ASCC berusaha untuk membentuk identitas bersama dan membangun masyarakat yang peduli.

ASCC akan memfasilitasi pembentukan APSC dan AEC. Cetak biru mencakup enam elemen utama: pembangunan manusia, kesejahteraan dan perlindungan sosial, keadilan sosial dan hak-hak, memastikan kelestarian lingkungan, membangun identitas ASEAN, dan mempersempit kesenjangan pembangunan. Kegiatan bersama blok dalam cetak biru sedang dipercepat di berbagai bidang. Secara khusus, negara-negara ASEAN telah mendorong pembelajaran seumur hidup, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang ASEAN. ASEAN juga telah memperkuat hubungan medis untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan HIV/AIDS sambil bekerja sama untuk mengurangi kemiskinan, memastikan keamanan pangan dan energi, membangun ASEAN yang bebas narkoba dan menanggapi bencana alam (VNA, 2015).

Selanjutnya, perlindungan dan promosi hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang tua, orang-orang cacat, dan pekerja migran juga diperketat. ASEAN juga telah meningkatkan kerja sama dalam mengatasi tantangan lingkungan lintas batas seperti polusi kabut asap, limbah, lingkungan laut, perlindungan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim (VNA, 2015).

Sementara itu, untuk membangun identitas ASEAN dan meningkatkan kesadaran publik, para negara anggota telah melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya tradisional mereka, dan menekankan persatuan dalam keanekaragaman.

### C. Kondisi Ekonomi ASEAN

Pada tahun 2012 Bank Dunia berpandangan bahwa negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara merupakan harapan di tengah isu perekonomian global. Perekonomian Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina diperkirakan akan tetap tumbuh dikarenakan adanya dorongan dari konsumsi dalam negeri. Berdasarkan laporan Bank Dunia yang dilansir dari *The Business Time, Asian Development Bank* (ADB) memuji negara-negara di kawasan ASEAN atas kesuksesannya mencapai pertumbuhan ekonomi yang membuat mereka terlindung dari permasalahan ekonomi global. Masih berdasarkan laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berlanjut sebesar 5,7 persen pada tahun 2013 dan 5,8 persen di tahun 2014 (NUR/IGW, 2012).

Masih dalam kurun waktu 2012, kondisi perekonomian negara anggota ASEAN lainnya yaitu Myanmar juga diperkirakan akan membaik dikarenakan adanya keterlibatan peran masyarakat internasional. Perekonomian Myanmar dilaporkan terus mengalami percepatan pada tahun fiskal 2011-2012 dengan angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,5 persen, dan diperkirakan akan mencapai 6,3 persen pada tahun fiskal 2012-2013. Namun kondisi buruk diperkirakan akan terjadi pada perekonomian negara anggota ASEAN lainnya yaitu Singapura karena dampak eksternal dari perekonomian global (NUR/IGW, 2012).

Sektor jasa di Asia Tenggara telah menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, saat sektor pertanian telah menurun dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2012, sektor jasa berkontribusi bagi mayoritas GDP sepuluh negara ASEAN, rata-rata mulai dari 35 persen hingga lebih dari 60 persen dari GDP. Ekonomi ASEAN5 kini secara bertahap bergerak ke sektor tertier, sementara kelompok BCLMV tengah membangun sektor sekunder dan tertier di negeri masing-masing (Purwanto, 2013).

Di sisi lain, kesepakatan tentang adanya pasar tunggal yang dinamai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang dimulai pada tahun 2015 diharapkan dapat mempermudah proses perdagangan barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan riset dari *International Labor Organization* atau ILO, pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa manfaat dari adanya pembukaan pasar tenaga kerja ini cukup besar. MEA diperkirakan akan dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta jiwa penduduk Asia Tenggara karena dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru. ILO juga menyebutkan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta pada tahun 2015. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja kelas menengah juga diperkirakan akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi (BBC, Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean, 2014).

Negara-negara anggota ASEAN memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dikarenakan terjadinya fenomena *demographic boom*. Pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja produktif yang signifikan diiringi dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik akan memacu terjadinya pertumbuhan tingkat konsumsi industri dan rumah tangga yang meningkat. Namun hal yang disayangkan ialah sebagian besar pertumbuhan tingkat konsumsi tersebut masih didominasi oleh barang-barang impor yang bukan hanya dapat berpengaruh terhadap keseimbangan nilai tukar namun juga dapat mengakibatkan membesarnya potensi terjadinya *imported inflation* (Setiastuti, Wijajna, Asyahid, Pekerti, Wang, & Falakh, 2014).

Dengan situasi ekonomi global yang masih diselimuti ketidakstabilan, wilayah ASEAN yang terdiri dari negara-negara berkembang harus menemukan cara supaya bisa tetap berkembang, mengingat kawasan ini pernah merasakan efek yang cukup kuat saat krisis global beberapa waktu lalu.



Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, dampak efek berlebihan saat krisis telah memainkan peran besar dalam peroses perkembangan ASEAN. Ketika itu ASEAN nampak sebagai kelompok ekonomi yang rapuh, namun kawasan ini segera bertindak dan belajar dari pengalaman yang tidak mengenakan tersebut. Saat ini ASEAN telah kembali pulih dengan pertumbuhan yang sehat dan sektor keuangan yang stabil (Arvirianty, 2017).

#### **D. Kondisi Politik ASEAN**

Pengaturan kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*). Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN diadakan minimal dua kali dalam setahun. Pertemuan yang pertama diselenggarakan di Pattaya, Thailand tahun 2009. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN didukung oleh para pejabat tinggi di bidang politik dan keamanan (Kemlu, 2015).

Seluruh negara anggota ASEAN telah menjadi bagian dari komunitas yang bekerja bersama untuk mencapai maksud dan tujuan yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN yang ditandatangani di Bangkok pada 1967 lalu. ASEAN telah berhasil meredakan ketegangan di wilayah tersebut dan telah membantu mempertahankan situasi yang berpotensi ledakan pada tingkat yang dapat dikelola. ASEAN telah berhasil mengubah wilayah yang penuh dengan perselisihan dan persaingan menjadi lingkungan yang umumnya stabil. ASEAN juga telah membangun jaringan Asia-Pasifik untuk perdamaian melalui perjanjian, mekanisme, dan proses untuk kerja sama politik dan ekonomi yang telah dibentuk atau dilibatkan selama bertahun-tahun. Ini mengartikan bahwa ASEAN telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Selanjutnya, dengan dibentengi oleh solidaritas kawasan Asia Tenggara dan oleh rasa hormat yang tumbuh yang diberikan oleh komunitas internasional, dan dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan dinamisme ekonominya yang susah payah, ASEAN akan mengambil inisiatif baru dan menjangkau hal-hal yang lebih jauh guna meningkatkan kestabilan kawasannya (ASEAN.org, 2012).

### **E. Kondisi Keamanan ASEAN**

Stabilitas keamanan kawasan merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan pembangunan Masyarakat ASEAN 2015. Berawal dari konflik perbatasan Kamboja-Thailand, Indonesia sebagai Ketua ASEAN telah berperan aktif untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini secara damai melalui negosiasi. Lebih lanjut terkait dengan masalah perdamaian, penyelesaian dan manajemen konflik, pada KTT ke-18 di Jakarta, Indonesia telah memprakarsai pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR). Gagasan Indonesia dimaksud mendapatkan dukungan penuh negara anggota ASEAN. Diharapkan dengan adanya AIPR, ASEAN dapat mengembangkan kapasitasnya dalam bidang penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan (Kemlu, 2015).

Pada November 2012, AIPR secara resmi disahkan dalam KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh. Dalam melaksanakan tugasnya, AIPR memiliki *Governing Council* sebagai pengambil kebijakan dan *Advisory Board* sebagai badan penasihat. *Governing Council AIPR* telah melakukan dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 10 Desember 2013 di Jakarta dan pada tanggal 21 April 2014 di Bali. Dalam kesempatan pertemuan kedua *Governing Council AIPR*, dilaksanakan pula pertemuan pertama *Advisory Board AIPR* dan kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk simposium berjudul *Peace and Reconciliation: Principles and Best Practice* yang penyelenggaraanya dilakukan bekerjasama dengan *Institute for Peace and Democracy* (IPD). Pertemuan *Advisory Board* yang

kedua telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 November 2014 (Kemlu, 2015).

Di sisi lain, dalam rangka pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), ASEAN telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR*). AICHR memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan badan ASEAN lainnya yang terkait dengan HAM dalam rangka melakukan koordinasi dan sinergi di bidang HAM.

Sementara itu, untuk mengefektifkan upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, ASEAN telah memiliki Rencana Aksi untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara (*Plan of Action to Combat Transnational Crime*) yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu strategi kawasan yang terpadu untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara, dengan fokus pada delapan (8) bidang prioritas, yaitu: *counter terrorism, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, money laundering, arms smuggling, sea piracy, international economic crime, dan cybercrime* (Kemlu, 2015).

Kemudian di bidang pemberantasan terorisme, salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang ditandatangani oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Sejak 27 Mei 2011, ACCT berlaku setelah enam negara anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei) meratifikasinya. Indonesia meratifikasi ACCT melalui UU No. 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013 (Kemlu, 2015).

Selanjutnya dalam bidang Perlindungan terhadap Perdagangan dan Penyelundupan Manusia (*Trafficking in Persons/TIP*), *Trafficking in persons (TIP)* merupakan salah

satu bentuk kejahatan lintas negara yang mendapat perhatian dan penanganan serius oleh negara-negara anggota ASEAN. Indonesia didukung oleh Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam menyampaikan agar WG memfokuskan pada upaya pembentukan ACTIP atau instrumen hukum lainnya, sebagaimana dimandatkan oleh para pemimpin ASEAN melalui *ASEAN Leaders' Joint Statement on Trafficking in Persons* (Jakarta, Mei 2011) dan ditegaskan lagi dalam *Joint Statement of 8th AMMTC* (Bali, Oktober 2011) dan *Joint Statement of 9th AMMTC* (Vientiane, September 2013). Pembentukan *ASEAN Convention on Trafficking in Persons* (ACTIP) sebagai sebuah instrumen yang mengikat sangat penting untuk menjadi landasan ASEAN dalam menangani kejahatan perdagangan orang dan meningkatkan kerja sama, baik dalam konteks ASEAN maupun dengan mitra wicara (Kemlu, 2015).

Selanjutnya keamanan dalam bidang maritim (*Maritime Security*). Kerja sama maritim serta pembahasan isu-isu maritim dalam kerangka ASEAN dilakukan dalam berbagai mekanisme diantaranya *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM), *ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus* (ADMM-Plus), *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF), dan sekitar 13 mekanisme ASEAN lainnya.

## **F. Keuntungan Menjadi Anggota ASEAN**

Fakta bahwa negara-negara di dunia tidak dapat berkerja sendirian dalam memenuhi kebutuhan negaranya adalah alasan yang paling dasar untuk melakukan kerjasama internasional. Kerjasama di dunia internasional ini terbagi dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah kerjasama regional. Di dalam ilmu Hubungan Internasional, regionlisme memiliki defenisi yang cukup beragam. Mansfield dan Milner membagi regionalisme ke dalam dua tipe yang berbeda. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis, pada tipe ini Mansfield dan Milner memaknai regionalisme sebagai

adanya hubungan kerja sama antara negara-negara yang berdekatan secara geografis, hubungan ini bisa berupa kerja sama dalam bidang ekonomi maupun politik. Tipe kedua dilihat berdasarkan faktor non-geografis, pada tipe kedua ini regionalism dimaknai sebagai aktivitas pemerintah dan non-pemerintah. Aktivitas tersebut dapat berupa peningkatan level ekonomi dan aktivitas politik yang terjalin di antara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis (Mansfield & Milner, 1999).

Seiring berjalannya waktu, negara-negara di dunia mulai membentuk organisasi regional sebagai wadah kerjasama untuk negara-negara yang berada dalam satu kawasan. ASEAN merupakan salah satu contoh organisasi regional berdasarkan tipe kedekatan geografis. ASEAN mewadahi berbagai bidang kerjasama bagi negara-negara anggotanya. Kerjasama tersebut antara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan stabilitas regional, industri dan pertanian, dan lain-lain. (Rudy, 2009). Dengan banyaknya bidang kerjasama yang diwadahi ASEAN, tentunya banyak pula keuntungan yang didapat oleh setiap anggotanya (Evita, 2018).

Dilansir dari *The Straits Times*, ASEAN dikatakan membawa manfaat besar bagi Singapura. Pernyataan ini didasari oleh fakta bahwa pasar domestik Singapura terdiri dari 5,6 juta konsumen. Di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN mengintegrasikan sepuluh ekonomi ke dalam satu pasar dan basis produksi. Ini berarti bahwa pasar domestik Singapura bukanlah 5,6 juta tetapi 628 juta konsumen. Masih berdasarkan *The Straits Times*, ekonomi ASEAN adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Saat ini ekonomi terbesar berada pada posisi ketujuh di dunia. Diprediksi bahwa pada tahun 2030, ASEAN dapat menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia.

Berbeda dengan tren proteksionis di tempat lain, ASEAN tetap berkomitmen untuk perdagangan bebas, integrasi regional, dan ekonomi terbuka. Sebagai contoh, ASEAN saat

ini mendorong negosiasi perjanjian perdagangan bebas besar, yang melibatkan ASEAN dan enam negara lain, yang disebut Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP akan menjadi salah satu daerah perdagangan bebas terbesar di dunia (Koh, 2018).

Di bidang politik, hal terpenting yang diperoleh Singapura dalam menjadi anggota ASEAN adalah kedamaian. Tanpa perdamaian, usaha ekonomi tidak akan mungkin tercapai. Tanpa kedamaian, pikiran manusia dan sumber daya dari negara-negara ASEAN akan difokuskan untuk membuat kerusakan daripada pembangunan. Tanpa kedamaian, perjalanan Singapura dari Dunia Ketiga ke Dunia Pertama akan lebih sulit, bahkan tidak mungkin. Selama 50 tahun terakhir, ASEAN telah memelihara perdamaian di Asia Tenggara. Tidak ada negara-negara ASEAN yang berperang selama periode ini (Koh, 2018).

Manfaat politik lain yang dibawa ASEAN ke Singapura adalah bahwa ia dapat membangun kemitraan dengan sepuluh mitra utama yang secara kronologis, adalah: Australia, Selandia Baru, Kanada, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, Rusia, dan India. ASEAN adalah organisasi regional yang sukses karena memiliki sikap terbuka dan inklusif terhadap para pemangku kepentingan eksternal, para pemimpin mitra dialognya datang setiap tahun untuk bertemu dengan para pemimpin ASEAN dan untuk berpartisipasi dalam forum yang dipimpin ASEAN seperti *ASEAN Plus Three* (Cina, Jepang dan Korea Selatan), *Forum Regional ASEAN* dan KTT Asia Timur. Bila tidak diwadahi ASEAN, mungkin tidak satu pun dari sepuluh negara anggota akan mampu menarik para pemimpin negara-negara paling penting di dunia untuk bertemu setiap tahun dengan mereka. Inilah pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN untuk Singapura dan anggota ASEAN lainnya (Koh, 2018).

Sementara itu dilihat dari sisi Timor Leste yang ingin bergabung dengan ASEAN, harapan-harapan terkait keuntungan Timor Leste apabila bergabung dengan ASEAN disampaikan oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmão. Gusmão berpandangan bahwa apabila Timor Leste masuk menjadi anggota ASEAN, ASEAN dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kestabilan ekonomi dan politik internal di dalam negaranya (Anggoro, 2013). Sebagai negara yang baru merdeka pada 2002, pemerintah Timor Leste telah memfokuskan tujuannya untuk mempertahankan kesatuan politik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bukanlah usaha yang mudah mengingat pernah terjadinya tindakan kekerasan, perpindahan penduduk dan perusakan harta benda yang dialami negara ini setelah referendum 1999. Pada saat itu sebagian besar infrastruktur di negara ini hancur, termasuk listrik, air, sistem pembuangan limbah, jalan, sekolah dan fasilitas medis serta properti sektor publik dan swasta. Meskipun kemajuan terus diusahakan, hingga saat ini lebih dari 40% populasi diperkirakan masih hidup di bawah garis kemiskinan dan angka penganggurana masih terhitung tinggi. (Lamont & Jebson, 2015).

Di sisi lain, Gusmão juga memiliki keyakinan bahwa jika negaranya bergabung menjadi anggota ASEAN, Timor Leste berkesempatan untuk mendapat peluang memperluas pasar ekspor. Komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 juga diharapkan akan memberi keuntungan bagi Timor Leste agar mendapatkan akses perdagangan bebas yang akan dilakukan dengan sepuluh negara anggota ASEAN yang lain. Hal serupa juga diungkapkan oleh Babo-Soares selaku Menteri Koordinator bidang Ekonomi merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste bahwa pencapaian kepentingan-kepentingan dalam ekonomi dilakukan atas perolehan akses dengan grup regional. Di samping itu, selain menjalin kerja sama dengan negara tetangganya yaitu Indonesia, Timor Leste juga semakin memperluas kerja sama regional dengan menjalin hubungan ekonomi dengan kekuatan mereka. Timor Leste juga mengharapkan mendapat asistensi dari negara anggota ASEAN

dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan Timor Leste terhadap Australia yang memiliki peran yang besar di dalam Timor Leste. Hal ini dikarenakan Timor Leste khawatir pada pengaruh Australia terhadap negaranya (Anggoro, 2013). Situasi krisis politik Timor Leste yang kerap tidak stabil juga mendorong negara ini untuk berkaca dengan ASEAN sebagai kerja sama regional yang stabil dan dinamis. Dengan bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ASEAN maka akan mendapatkan kestabilan politiknya dengan mudah. (Maratuthoharoh, 2015).

### **G. Mekanisme Penerimaan Anggota ASEAN**

Keinginan sebuah negara untuk menjadi anggota dari suatu organisasi regional tentunya harus terlebih dahulu mengikuti proses yang telah diatur. ASEAN sendiri memiliki beberapa syarat kepada negara Kawasan Asia Tenggara yang ingin menjadi anggotanya. Syarat menjadi anggota baru ASEAN tercermin pada Piagam ASEAN Pasal 6, yang berisi:

1. Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN.
2. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut:
  - a. letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara;
  - b. pengakuan oleh seluruh negara Anggota ASEAN;
  - c. kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam; dan
  - d. kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.
3. Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.
4. Negara pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan Instrumen Akses Piagam (ASEAN, 2008).



## **H. Langkah-langkah yang Telah Ditempuh Timor Leste untuk Bergabung Menjadi Anggota ASEAN**

Proposal keanggotaan Timor Leste diajukan pada saat Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN di tahun 2011. Pengajuan ini dinilai sebagai suatu tindakan yang tepat. Hal tersebut dikarenakan ketika Indonesia menduduki kursi ketua ASEAN, Timor Leste berharap status keanggotaannya bisa segera ditetapkan mengingat Indonesia telah memperlihatkan dukungan penuh kepada Timor Leste (Rudiany, 2015).

Timor Leste berpartisipasi di dalam rapat dengan negara-negara yang bernaung di bawah wadah ASEAN sebagai pengamat (*observer*) paska resmi berstatus sebagai pengamat di ASEAN pada 2002. Hal tersebut merupakan langkah pertama yang ditempuh oleh Timor Leste untuk bergabung ke ASEAN. Pada tahun 2005, Timor Leste bergabung ke dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan di tahun 2007 Timor Leste menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Guna menyesuaikan kepentingannya dengan ASEAN, Timor Leste mengutus Roberto Sarmiento de Oliveira Soares sebagai Sekretaris untuk urusan ASEAN. Kemudian Timor Leste juga membuka hubungan diplomatik dengan kesepuluh negara anggota ASEAN. Hingga tahun 2015, Timor Leste telah membuka kantornya di Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. Kedutaan besar Timor Leste yang berlokasi di Bangkok menangani urusan beberapa negara yaitu Kamboja dan Laos. Sedangkan Kedutaan Besar Timor Leste di Kuala Lumpur menangani hubungan diplomatik dengan negara Myanmar dan Vietnam (Riyadi, 2018).

Proposal keanggotaan yang telah diajukan Timor Leste kemudian dibahas dalam KTT ke-XXVIII. Ketika itu Indonesia mengusulkan pembentukan Dewan Koordinasi ASEAN yang terdiri dari para menteri luar negeri untuk menindaklanjuti status Timor Leste dalam ASEAN pada KTT ke-XIX. Agenda pembahasan terkait keanggotaan Timor Leste kemudian dilanjutkan pada saat KTT ASEAN ke-XX di Kamboja.

Dalam KTT ini, seluruh anggota ASEAN menyepakati pembentukan *ASEAN Coordinating Council-Working Group* (ACCWG) yang berfungsi sebagai peninjau kesiapan Timor Leste. Hal ini selanjutnya kembali dibahas dalam KTT ASEAN ke-XXII dan ke-XXIII yang diselenggarakan di Brunei Darussalam pada tahun 2013. Tetapi dalam pembahasan tersebut, ASEAN tidak menentukan status keanggotaan resmi Timor Leste. ASEAN justru memberikan rekomendasi bagi ACCWG untuk berhati-hati dan teliti ketika melakukan peninjauan atas kemampuan Timor Leste dalam berpartisipasi di ASEAN dari sudut pandang pembangunan kapasitas. ACCWG kemudian diperbolehkan untuk membentuk ACCWG *sub-working group* pada KTT ASEAN ke-VVIV tahun 2014 ketika Myanmar menjadi Ketua ASEAN. Pembentukan *sub-working group* ini bertujuan supaya ASEAN dapat meninjau perkembangan Timor Leste secara politik, ekonomi, dan sosial merujuk pada pilar-pilar yang ada dalam *ASEAN Community 2015* (Rudiany, 2015).

Berdasarkan penjelasan ini, Timor Leste harus kembali menunggu kepastian untuk menjadi anggota resmi, yaitu menunggu ACCWG siap untuk mengajukan agenda keanggotaan Timor Leste dalam pembicaraan di KTT ASEAN.